

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Nasionalisme adalah salah satu tema yang saat ini banyak mendapatkan perhatian dalam sejarah modern. Nasionalisme telah sangat dikenal dalam abad ke-21 walau bukan merupakan ciptaan abad ini karena pengaruhnya yang sangat besar terhadap pembentukan negara-negara baru di Asia dan Afrika. Seperti yang diungkapkan oleh Hans Kohn (1984), seorang Guru Besar Ilmu Sejarah di *The City College of New York*:

Nasionalisme adalah salah satu dari kekuatan yang menentukan dalam sejarah modern. Ia berasal dari Eropa Barat Abad ke-18; selama abad ke-19 ia telah tersebar di seluruh Eropa dan dalam abad ke-20 ia telah menjadi suatu pergerakan sedunia. Dari tahun ke tahun artinya makin bertambah penting di Asia dan Afrika. Tetapi Nasionalisme tidaklah sama di setiap negara dan setiap zaman. Ia merupakan suatu peristiwa sejarah, jadi ditentukan oleh ide-ide politik dan susunan masyarakat dari berbagai negara di mana ia berakar (Kohn, 1984:5).

Nasionalisme bukan lagi produk pencerahan Eropa tetapi menjadi label perjuangan di negara-negara Asia-Afrika yang dijajah bangsa Barat. Oleh karena itu, nasionalisme menjadi perhatian utama bangsa-bangsa berkembang karena sebagian di antara mereka merupakan bangsa yang baru berdiri sehingga belum memiliki identifikasi atau pencarian diri sebagai bangsa yang memiliki identitas yang kuat.

Nasionalisme sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, Jerman dan Prancis, yaitu *nation* atau dalam bahasa Belanda yaitu *natie* yang berarti bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme berasal dari kata “nasional” dan “isme”, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air. Dengan kata lain, nasionalisme atau paham kebangsaan adalah suatu bentuk yang timbul karena kesadaran nasional berbangsa dan juga bernegara. Dalam konteks nasionalisme seorang individu harus menyerahkan kesetiaan tertingginya kepada negara.

Konsep mengenai nasionalisme atau paham kebangsaan yang baru dikenal pada abad ke-19 mengalami beberapa kali perubahan makna. Sebelum tahun

1884, *nacion* atau *nation* diartikan sebagai kumpulan penduduk dari suatu provinsi, negeri atau kerajaan, dan orang asing. Kata ‘nasionalisme’ menurut Abbe Barruel untuk pertama kalinya dipakai di Jerman pada abad ke-15, yang diperuntukan bagi para mahasiswa yang datang dari daerah yang sama atau berbahasa sama, sehingga mereka itu (di kampus yang baru dan daerah baru) tetap menunjukkan cinta mereka terhadap bangsa/suku asal mereka (Adisusilo, tt.). Dahulu kesetiaan orang tidak ditujukan bagi negara kebangsaan, melainkan kepada pelbagai macam bentuk kekuatan dan kekuasaan sosial, organisasi politik, atau raja feodal, dan kesatuan ideologi seperti *clan*, negara kota, kerajaan dinasti, gereja dan golongan-golongan keagamaan. Selama berabad-abad lamanya, cita-cita dan tujuan politik bukanlah suatu negara-kebangsaan (Kohn, 1984, hlm. 4).

Meskipun demikian, Hans Kohn dan mayoritas ahli sejarah sepakat bahwa konsep nasionalisme modern dimulai sejak abad ke-18 di Eropa. Nasionalisme yang semula berkembang di Eropa itu juga berkembang di negara-negara luar Eropa, tetapi dengan nuansa yang berbeda. Paham ini meyakini bahwa nasionalisme lahir dari meletusnya revolusi yang dimulai pada perempat terakhir abad ke 18, yang ditandai dengan Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. Nasionalisme menonjol sejak revolusi Perancis, sebagai respon terhadap kekuatan-kekuatan imperium Barat yang berhasil meluaskan penetrasi kekuasaannya ke berbagai belahan bumi. Dengan slogan “*liberte, egalite, fraternite*”, nasionalisme menjadi ideologi baru yang sangat penting dan disejajarkan dengan demokrasi, karena tanpa sebuah negara nasional demokrasi akan sulit terwujud. Bahkan kolonialisme dan imperialisme merupakan bentuk dari nasionalisme yang bersifat ekspansif.

Pada periode selanjutnya, nasionalisme menyebar ke bagian Eropa lainnya, seperti Serbia, Yunani, dan Polandia. Gelombang nasionalisme besar yang pertama memuncak pada timbulnya rangkaian revolusi di Eropa pada tahun 1848 (*spring of peoples*). Pada pertiga akhir abad ke-19, nasionalisme gelombang kedua melanda Eropa Timur dan Eropa Utara, seperti Ceko, Slovak, Rumania, Bulgaria, Lithuania, Finlandia, Norwegia, Yahudi. Sedangkan di Asia, nasionalisme lahir di Jepang (masa restorasi Meiji), India, Armenia dan Mesir. Awal perkembangan nasionalisme di Asia ini melahirkan nasionalisme di

kawasan Asia lainnya, seperti Turki, Arab, Persia, Burma (Myanmar), Jawa, Filipina, Vietnam dan Tiongkok. Di Afrika, nasionalisme berkembang di Nigeria, Ghana dan Afrika Selatan. Berbeda dengan nasionalisme di Eropa, gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika mengambil bentuk gerakan “kemerdekaan” yang antikolonial (Smith, 2003, hlm. 108-109).

Nasionalisme semakin kuat pengaruhnya di wilayah yang mengalami kolonialisme dan menjadi pusat perhatian setelah berakhirnya Perang Dunia II atau dengan meluasnya perang dan revolusi yang banyak dilakukan atas nama nasionalisme dan anti-kolonialisme (Sargent, 1986, hlm. 23). Media massa banyak memberitakan mengenai perpecahan kolonialisme atau disintegrasi di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Hal ini dipaparkan oleh Sujatmiko (Kusumawardhani dan Faturachman, 2004, hlm 61) seperti berikut:

Pada abad ke-20 terdapat lebih dari sepuluh kasus disintegrasi, antara lain Korea Utara-Korea Selatan (1948), Jerman Barat-Jerman Timur (1949), Malaysia-Singapura (1965), dan Uni Soviet (1990). Data sepanjang tahun 1945-1995 mencatat terjadi 38 perang, 64 kasus separatisme dan 62 konflik ideologi atau faksional. Kasus separatisme yang terjadi di benua Afrika tercatat 21 kasus, Timur Tengah 12 kasus, Asia Selatan 10 kasus, Asia Tenggara 11 kasus, Asia Timur 1 kasus, Eropa Timur 2 kasus, Eropa Barat 2 kasus dan Uni Soviet 5 kasus.

Bagi Barat, atas dasar ini pula nasionalisme sudah dianggap sebagai sebuah persoalan dan kemungkinan tidak dapat dilepaskan dari konotasi yang negatif. Abad ke-19 dan ke-20 yang dijuluki sebagai abad ideologi merupakan masa yang penuh dengan benturan sosial yang hampir meliputi seluruh belahan dunia. Pembebasan banyak bangsa-bangsa di abad ke-20 tidak memperkuat kecondongan ke perdamaian dan kemerdekaan. Hal ini membuat istilah nasionalisme memiliki artian yang negatif, seperti di Amerika Serikat yang lebih memilih kata patriotisme daripada nasionalisme. Menurut Sargent (1986) bahwa sebetulnya nasionalisme dan patriotisme tidaklah berbeda, karena dalam artian sempit nasionalisme hanyalah merupakan ungkapan perasaan yang jauh lebih kuat dibanding patriotisme. Nasionalisme juga telah memberi suatu sarana untuk mempersatukan negara-negara. Penolakan kekuasaan kolonial oleh bangsa-bangsa berkembang telah menjadi suatu sarana untuk mengembangkan identitas nasional, keterpaduan dan tujuan (Sargent, 1986, hlm. 32).

Fajar Munandar, 2017

NASIONALISME KOREA UTARA: PENERAPAN IDEOLOGI JUCHE PADA MASA PEMERINTAHAN KIM IL SUNG (1955-1994)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Merujuk pendapat Kohn mengenai perbedaan nasionalisme di setiap negara yang disesuaikan dengan ide politiknya, nasionalisme di Asia memiliki kekhususan tersendiri yang pada hakikatnya merupakan hasil pengenalan bangsa Asia dengan kolonialisme dan imperialisme. Nasionalisme ini muncul bukan karena peniruan (imitasi) dari nasionalisme Eropa. Nasionalisme Asia pada dasarnya tumbuh sebagai reaksi atas kolonialisme bangsa Barat. Nasionalisme dalam perlawanannya terhadap kolonialisme tidak selalu bersifat pasif, dengan cara menutup diri, tetapi juga dengan cara mengambil sisi-sisi positifnya. Sehingga tidak bisa dipungkiri perkembangan nasionalisme di negara dunia ketiga tidak lepas pertumbuhannya dari imperialisme. Di daerah jajahan dengan eksploitasi kolonial, diskriminasi ras, dominasi politik dengan otoritarianisme, paternalisme, otokrasi, sentralisasi mau tak mau menimbulkan reaksi dalam pelbagai bentuk, mulai dari emansipasi, progresivisme, demokrasi, otonomi hingga revolusionisme (Kartodirdjo, 1993, hlm.182).

Menurut Mudji Hartono (tt), seorang guru besar sejarah Universitas Negeri Yogyakarta dalam karya tulisnya yang berjudul “Nasionalisme Asia Timur; Perbandingan Jepang, China Dan Korea” mengatakan bahwa pembentukan nasionalisme di Asia sering dihadapkan dengan kolonialisme Barat atau merupakan reaksi atas kehadiran kolonialisme Barat. Namun terdapat perkembangan lain, pembentukan nasionalisme di kawasan Asia Timur terjadi beberapa kali. Di Tiongkok terdapat bentuk penjajahan semi-kolonial karena tidak semua wilayahnya diduduki kolonial. Jepang sendiri tidak pernah dijajah bangsa Barat, akan tetapi ancaman penjajahan bangsa Barat menimbulkan nasionalisme. Korea beberapa kali diduduki oleh Tiongkok dan terakhir oleh Jepang (1910-1945). Pembentukan nasionalisme Korea muncul karena ingin melepaskan diri dari penjajahan Jepang.

Perkembangan pembentukan nasionalisme Korea merupakan perkembangan nasionalisme yang sangat unik karena meskipun telah meraih kemerdekaan dari imperialisme Jepang, pembentukan nasionalisme Korea saat ini tidaklah menjadi satu kesatuan Korea yang utuh seperti yang diperjuangkan oleh para gerakan nasionalis Korea. Pasca pembebasan Korea, Semenanjung Korea harus terbagi dua menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Dengan menganalisis

Fajar Munandar, 2017

NASIONALISME KOREA UTARA: PENERAPAN IDEOLOGI JUCHE PADA MASA PEMERINTAHAN KIM IL SUNG (1955-1994)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sejarah Korea, peneliti membagi perkembangan pembentukan nasionalisme Korea ke dalam dua fase. Fase pertama adalah gelombang nasionalisme yang melahirkan gerakan sosial melawan imperialisme Jepang ketika menjajah Korea pada kurun waktu 1910-1945 atau kurang lebih selama 35 tahun. Sedangkan fase kedua adalah pada saat Korea terbagi menjadi dua bagian, yaitu ketika Uni Soviet dan Amerika menduduki Semenanjung Korea bagian Utara dan Selatan.

Pada fase pertama, pergerakan nasional Korea meletus pada 1 Maret 1919 bersamaan dengan peringatan wafatnya Raja Kojong. Ketika itu pula dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Korea di Taman Pagoda. Tradisi negara menjadi elemen untuk menyatukan rakyat, dan karena itu mendasari munculnya nasionalisme Korea. Para aktivis di luar negeri yang tergabung dalam Asosiasi Pemuda Korea di Shanghai, melakukan upaya mencari pengaruh bagi kemerdekaan Korea di luar negeri melalui Perjanjian Versailles. Mereka juga membentuk pemerintahan-pemerintahan di pengasingan, sedangkan Gerakan Pemuda Nasional di Korea menghimpun dana untuk kepentingan perjuangan (Radio Korea International, KBS, 1995, hlm. 187).

Menurut Nasution (1965) dalam bukunya yang berjudul *Korea Baru* perlawanan juga timbul dari Gerakan Rakyat Tani dan Buruh yang semakin berkembang dan berakar ke bawah, menjadi gerakan massa yang luas. Antara tahun 1926-1945 gerakan anti-Jepang sering kali dilakukan secara fisik oleh pemuda, petani, buruh dan Gerakan Tentara Revolusioner Rakyat Korea. Selain itu, kaum nasionalis mendirikan wadah organisasi yang bernama *Sinkahoe* (Hartono, tt). Organisasi ini bertujuan untuk menyatukan kaum pergerakan tanpa membedakan ideologi. Namun, organisasi ini kurang berhasil sehingga kaum pergerakan bergerak sendiri-sendiri. Salah satunya adalah organisasi bentukan komunis yang akhirnya dibubarkan pada tahun 1928 (Nasution, 1965, hlm. 28).

Perlawanan anti-Jepang juga dilakukan dengan melakukan pemogokan-pemogokan di berbagai daerah, seperti di Wonsan pada permulaan tahun 1929, kemudian pemogokan di pabrik tekstil Pusan, kemudian pemogokan dan demonstrasi di pabrik karet Pyongyang, di tambang batubara Shinheung, dan demonstrasi-demonstrasi anti-Jepang oleh petani-petani di distrik Jungpyun, Provinsi Hamkyung Selatan, kemudian disusul perlawanan kaum tani di Danchun

pada tahun 1930. Pemogokan mahasiswa terjadi pula di Kwangjoo pada tahun 1929 yang semakin meluas menjadi perlawanan mahasiswa yang besar.

Dalam tahun 1930-an gerakan kemerdekaan nasional Korea mulai mendapat pimpinan dengan munculnya Kim Il Sung. Gerakan itu dengan cepat meluas dan menjadi gerakan massa, pemuda, mahasiswa, buruh dan tani. Pada saat yang bersamaan Kim Il Sung menegaskan pentingnya pembentukan persatuan yang luas dari front nasional anti-Jepang di atas dasar persatuan buruh-tani dibawah pimpinan kelas pekerja. Gerakan ini juga semakin meluas dan kuat saat merapat dengan gerakan buruh internasional di bawah panji-panji internasionalisme proletar. Di bawah koordinasi pemimpin kaum komunis yang dipimpin oleh Kim Il Sung, pada 1932 didirikan Partai Komunis yang meliputi daerah Antu, Wangching, Yenching, Humchun, Hualung dan kota-kota lain di Mancuria Timur.

Masih dalam bukunya Nasution, disekitar pertengahan tahun 1936, dengan dipimpin oleh kaum komunis, diorganisir pula oleh gerakan massa, persatuan kembali untuk pemulihan Korea, suatu gerakan dari front persatuan anti-Jepang. Gerakan ini meliputi semua organisasi anti-Jepang, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Kim Il Sung membuat program sepuluh pasal dari organisasi ini dan merupakan program revolusioner pertama, suatu implementasi kreatif dari ajaran Marxisme-Leninisme di Korea pada masa itu. Program itu menjelaskan tugas-tugas anti imperialisme, anti-feodalisme dan demokrasi, dan karakter dari demokrasi rakyat dari revolusi Korea, seperti pendirian kekuasaan rakyat, perubahan-perubahan dalam lapangan-lapangan sosial, ekonomi dan kebudayaan (Nasution, 1965, hlm. 30). Gerakan ini semakin gencar melakukan perlawanan fisik terhadap Jepang hingga menjelang Perang Dunia II.

Pada tahun 1941-1945, berkobarlah Perang Dunia II di Eropa dan Asia dan sekaligus menjadi titik balik kekalahan Jepang dalam politik ekspansifnya. Sesuai perjanjian Yalta (1945) dinyatakan bahwa Uni Soviet akan mengumumkan perang terhadap Jepang setelah perang di Eropa selesai. Pasukan Uni Soviet menyerang Jepang melalui Semenanjung Korea. Dalam perjanjian Postdam pada Juli 1945, disepakati bahwa Korea akan dimerdekakan (Agung, 2012, hlm. 131). Pada 8

Fajar Munandar, 2017

NASIONALISME KOREA UTARA: PENERAPAN IDEOLOGI JUCHE PADA MASA PEMERINTAHAN KIM IL SUNG (1955-1994)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Agustus 1945, Uni Soviet menyerang pasukan Jepang lewat semenanjung Korea dan mencapai garis 38° Lintang Utara (LU). Pasukan revolusioner yang bekerja sama dengan Uni Soviet berhasil memperoleh kemenangan setelah berperang selama enam hari (Agung, 2012, hlm 132. Nasution, 1965.Hartono, tt.).

Akan tetapi bangsa Korea gagal memperoleh kemerdekaan nasional pada tanggal 15 Agustus 1945, karena sekutu membagi Korea menjadi dua, yakni Korea Utara di bawah pengawasan Uni Soviet dan Korea Selatan di bawah pengawasan Amerika Serikat. Pihak Amerika dan Uni Soviet sebenarnya tidak menjadikan garis 38° sebagai garis demarkasi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Garis tersebut hanya merupakan batas wilayah untuk menerima tawanan-tawanan perang Jepang pasca Perang Asia Pasifik. Namun akhirnya, garis tersebut menjadi garis pertahanan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dengan demikian, pembagian Korea menjadi dua bagian menjadikan suatu garis pertikaian antara dua kekuatan. Lebih jauh lagi, secara tidak langsung menghalang-halangi cita-cita bangsa Korea untuk menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu (Agung, 2012, hlm. 133).

Pendudukan Korea oleh masing-masing pihak yang tengah bersaing yang lebih dikenal dengan istilah Perang Dingin, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat berlanjut ke dalam penanaman pengaruh terhadap politik dan ekonomi Korea. Padahal Kemerdekaan Korea harus segera diberikan sesuai dengan Perjanjian Postdam. Di Korea Utara pengaruh Uni Soviet sangat kuat, Kim Il Sung membentuk partai revolusioner dengan berlandaskan ajaran Marxisme-Leninisme. Selanjutnya, Kim menentukan karakter dari revolusi Korea sebagai revolusi demokrasi anti-imperialis, anti-feodal dan membentuk tenaga basis demokrasi. Sedangkan di Korea Selatan pengaruh Amerika Serikat sama kuatnya, Korea Selatan menjalankan sistem ekonomi liberalis-kapitalis dengan paham demokrasi liberal. Penanaman modal asing menjadi pendorong ekonomi dalam negeri, di samping masuknya produk-produk Amerika Serikat. Oleh sebab itu, lahirlah dua sistem masyarakat yang saling bertentangan di satu negara dari satu bangsa (Nasution, 1965, hlm. 35-36).

Adanya pertentangan antara kedua Korea tersebut semakin menghambat pembentukan nasional yang utuh. Padahal sebagai tindak lanjut dari Perjanjian

Postdam, diadakan konferensi para menteri luar negeri di Moskow yang membuahkan kesepakatan antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris yang menyatakan akan segera membentuk pemerintahan Korea yang demokratis. Pemerintahan ini merupakan pemerintahan perwakilan internasional yang akan berlangsung selama lima tahun. Namun, pelaksanaan pemerintahan perwakilan internasional ternyata tidak dapat diwujudkan karena tidak ada kesepakatan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Akhirnya Amerika Serikat membawa masalah Korea ke dalam Sidang Umum PBB, meskipun sebelumnya telah disepakati bahwa masalah Korea merupakan persoalan rakyat Korea sendiri dan merupakan persoalan sesudah perang (Nasution, 1965. Agung, 2012).

Pada 14 November 1947, Sidang Umum PBB memutuskan untuk membentuk Komisi yang dinamakan *United Nations Temporary Commission on Korea* (Komisi Sementara PBB untuk Korea). Hasil sidang menyarankan untuk segera melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih wakil-wakil rakyat Korea. Tugas dari Komisi Sementara PBB untuk Korea adalah, 1) mengadakan pengawasan keberlangsungan Pemilihan Umum, dan 2) mengadakan pembicaraan dengan para wakil rakyat hasil Pemilihan Umum untuk merundingkan masalah kemerdekaan Korea. Keputusan ini merupakan hasil pembicaraan di PBB yang mengandung makna menegaskan perjuangan nasional Korea. Oleh karena itu, organisasi sosial dan politik berusaha mempersiapkan rancangan pembentukan negara baru.

Padatahun 1948 dua negara Korea baru didirikan, yaitu Republik Korea di selatan pada 15 Agustus 1948 dengan menunjuk Syngman Rhee sebagai presiden pertamanya. Sedangkan Republik Demokrasi Rakyat Korea di utara pada 9 September 1948 dengan Kim Il Sung sebagai presiden pertamanya. Pemerintahan di Korea Utara dibentuk berdasarkan sistem komunisme, sedangkan Republik Korea berdasarkan demokrasi dan kapitalisme. Permasalahan semakin meruncing ketika PBB hanya mengakui hasil-hasil pemilihan di Korea Selatan. Sidang menyatakan bahwa pemerintahan Korea Selatan adalah satu-satunya pemerintahan yang sah. Hal ini membuat Korea Utara semakin tidak menyukai PBB dan Amerika Serikat karena seakan-akan tidak diberikan haknya (Agung, 2012, hlm. 134-135).

Fase kedua adalah pembentukan nasionalisme setelah Korea terbagi menjadi dua negara, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Fase inilah yang menjadi pembahasan peneliti, dengan kajian khusus mengenai nasionalisme Korea Utara.

Fajar Munandar, 2017

NASIONALISME KOREA UTARA: PENERAPAN IDEOLOGI JUCHE PADA MASA PEMERINTAHAN KIM IL SUNG (1955-1994)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pemilihan negara Korea Utara sebagai kajian peneliti karena ketertarikan peneliti terhadap peranan besar Kim Il Sung sebagai tokoh nasionalis Korea dan juga pemimpin gerakan revolusi Korea sejak masa imperialisme Jepang sampai lahirnya ideologi *Juche* sebagai alat pemersatu nasionalisme Korea Utara. Pembentukan dua Korea yang semula merupakan efek Perang Dingin berlanjut kepada persaingan dalam tensi tingkat tinggi antar dua negara bersangkutan. Kedua negara bersaing dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik tetapi tidak melupakan persoalan mengenai reunifikasi Korea. Bahkan Perang Saudara yang terjadi pada 1950-1953 tidak lepas dari isu nasionalisme Korea dalam reunifikasi Korea yang diusung oleh Kim Il Sung. Hal ini diakui oleh pihak Korea Selatan sendiri dalam perang saudara tersebut, Kim Il Sung mendapatkan simpati dari rakyat Korea Selatan atas ikrarnya untuk menyatukan Korea dan memperbaiki nasib rakyat Korea (Agung, 2012, hlm. 137). Meskipun akhirnya perang tersebut tidak menemui titik akhir sehingga harus dibuat kesepakatan gencatan senjata antara kedua belah pihak. Peristiwa berdarah di Korea ini menyebabkan munculnya pandangan-pandangan negatif dan rasa tidak percaya antar Korea yang sulit untuk disembuhkan.

Untuk memulihkan kondisi kehidupan Korea Utara yang hancur akibat perang, Kim segera melaksanakan kebijakan untuk memulai rekonstruksi dan revolusi di Korea Utara. Namun pemerintahan Kim Il Sung dibawah bendera komunisme banyak menuai kontroversi dari dunia internasional. Barat memandang bahwa Korea Utara dibawah Kim Il Sung adalah sebuah pemerintahan totaliter. Namun pemberian istilah ini harus diperhatikan lagi karena tidak semua negara otoriter atau komunis dapat dikategorikan sebagai totaliterisme seperti yang diyakini mayoritas masyarakat dunia. Hal ini diutarakan oleh Rodee:

“Juga diragukan apakah fasis Italia (kata “totaliterisme” tampaknya ditemukan oleh Mussolini), Uni Soviet dibawah Krushev dan Brezhnev, Kuba dibawah Castro (atau Batista), Franco di Spanyol, atau bahkan Cina dibawah Mao haruslah dicap “totaliterisme”. Dan cap itu tentu menyesatkan bila dikaitkan dengan Polandia, Hungaria, Yugoslavia, Afrika Selatan, Vietnam dan kedua negara Korea, serta berbagai negara otoriter lainnya sekarang ini yang lebih suka dihina daripada diberi julukan “totaliter”... Orang tak boleh seenaknya menggunakan istilah itu sekedar dalih untuk melakukan penelitian yang seksama dan analisa yang tidak memihak. Tetapi juga jelas bahwa suatu pemerintahan oleh sedikit orang, bagaimanapun ringan atau berat kediktatorannya, ia tidaklah sesuai dengan pengertian awam tentang demokrasi” (Rodee, 2009, hlm. 58-59).

Berdasar penjelasan di atas, peneliti melihat bahwa salah penafsiran ini tumbuh dan berkembang sebagai akibat dari berubahnya peta politik dunia pada akhir abad ke-20, yaitu pada saat dunia mulai dikuasai oleh kekuatan liberalis-kapitalis Amerika Serikat serta paham demokrasi dan sosialisme-komunisme dunia perlahan mulai runtuh yang dimulai dengan bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur, dan runtuhnya Uni Soviet dan Yugoslavia seiring menguatnya paham-paham nasionalisme dan demokrasi yang akhirnya memecah belah negara tersebut.

Dunia Barat menilai sosok kepemimpinan Kim Il Sung adalah sosok pemimpin tirani yang sangat protektif dan keras terhadap rakyatnya. Pemerintahannya dianggap otokratis, mengisolasi dan cenderung diktatorial banyak mendapatkan kecaman dunia internasional yang memang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan didominasi oleh ekonomi kapitalisme. Dunia Barat menilai jika Kim Il Sung merupakan seorang diktator, tirani, dan terperdaya oleh propagandanya sendiri (Alejandro, 2007. Luka, 2008. Montefiore, 2007).

Bahkan Montefiore (2008) yang memasukkan Kim Il Sung dalam bukunya yang berjudul *Tokoh Kontroversi Dunia* menggambarkan sosok Kim Il Sung seperti berikut;

Brutal, bernaluri pembunuh, penindas, dan terperdaya propagandanya sendiri, Kim Il Sung mengaku sebagai “Pemimpin Besar” sekaligus diktator yang berkuasa untuk waktu lama di Korea Utara. Ia membawa negaranya ke jalan perang, pengucilan dunia internasional, dan kejatuhan ekonomi. Selama separuh abad usia pemerintahannya, Korea Utara menjadi negara yang diperintah rezim paling totaliter dan ganjil di dunia... (hlm. 263).

Bagi dunia Barat yang liberal seakan meyakini bahwa tidak ada kebaikan didalam negara Korea Utara. Kim Il Sung, pemimpin tertinggi dan presiden abadi Korea Utara tidak lebih dianggap sebagai sosok Stalin baru dengan pengkultusan dirinya yang melebihi mentornya tersebut. Hal ini semakin menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai kondisi politik Korea Utara dan sosok Kim Il Sung.

Hal lain yang menjadi ketertarikan peneliti mengangkat tema mengenai Korea Utara, yaitu pada saat membaca sebuah artikel ilmiah karya Raviyo Patra

Fajar Munandar, 2017

NASIONALISME KOREA UTARA: PENERAPAN IDEOLOGI JUCHE PADA MASA PEMERINTAHAN KIM IL SUNG (1955-1994)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(2012) berjudul *Idiosinkrasi dalam sosok Kim Il Sung: Lahirnya Ideologi Juche dan Nasionalisme Korea Utara*. Dalam tulisannya tersebut Patra berusaha untuk memberikan penekanan bahwa kelahiran ideologi *Juche* merupakan simbol nasionalisme Korea Utara. Akan tetapi Patra tidak menjelaskan bagaimana ideologi *Juche* itu dijalankan di Korea Utara. Meskipun demikian, peneliti berasumsi bahwa inti dari karya tulis Patra terletak pada penjelasan berikut:

“Kim Il Sung mengembangkan ideologi *Juche* setelah memiliki pemikiran yang mendalam mengenai apa yang dibutuhkan untuk mencapai suatu era baru. Era dimana setiap orang dapat menjadi penentu takdirnya masing-masing (*masters of their own destiny*). *Juche*, yang secara etimologis berarti kendali seseorang atas tubuhnya (*control of one's own body*), mengekspresikan desakan Korea Utara akan isu independensi personal yang dipercaya berakar pada peraturan Jepang pada masa kolonial. Ideologi inilah yang kemudian menggantikan Marxisme-Leninisme sebagai ideologi negara Korea Utara” (Herman, 2004. Patra, 2012, hlm 3).

Patra berusaha memberikan pandangan bahwa lahirnya ideologi *Juche* di Korea Utara adalah buah dari perpaduan pengalaman hidup Kim Il Sung dan kondisi sejarah Korea Utara. Ideologi *Juche* yang diartikan sebagai simbol untuk memperkuat identitas nasional Korea Utara menjadi alat nasionalisme yang kuat dalam menjalankan kehidupan berbangsa yang bebas dari intervensi asing.

Ideologi *Juche* yang menjadi ideologi tunggal di Korea Utara menjadi perhatian peneliti. Ideologi *Juche* pertama kali diperkenalkan oleh Kim Il Sung pada 28 Desember 1955 dalam pidatonya bersama Partai Buruh Korea yang berjudul “*On Eliminating Dogmatism and Formalism and Establishing Juche in Ideological Work*” (Seong-Chang, 2000 hlm. 138). Dalam pidatonya tersebut Kim Il Sung mengungkapkan bahwa ideologi *Juche* adalah praktek penerapan ajaran Marxisme-Leninisme yang telah disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural Korea Utara. Hal ini diperkuat oleh Grace Lee sebagai berikut:

“The DPRK claims that Juche is Kim Il Sung’s creative application of Marxist-Leninist principle of the modern political realities in North Korea. Kim Il Sung and his son Kim Jong Il have successfully wielded the Juche idea as a political shibboleth to evoke a fiercely nationalistic drive for North Korean independence and to justify policies of self-reliance and self-denial in the face of famine and economic stagnation in North Korea. Kim Il Sung envisioned three specific application of Juche philosophy: political and ideological independence, especially from Soviet Union and China;

economic self-reliance and self-sufficiency; and viable national defense system (2003, hlm. 105)

Menurut Lee, keberhasilan Kim Il Sung dalam menerapkan ideologi *Juche* Korea Utara tidak lepas dari suksesnya Kim Il Sung dalam menanamkan *Juche* sebagai semboyan politik yang kuat untuk membangkitkan sikap nasionalistis dan mengarahkannya menuju Korea Utara yang mandiri dan membenaran politik mandiri serta pengorbanan diri di tengah kemiskinan atau kelaparan dan macetnya roda ekonomi di Korea Utara.

Hal ini diperlukan bagi sebuah negara berkembang yang baru berdiri, seperti Korea Utara, sebuah identitas nasional sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi negaranya. Nasionalisme, ideologi, dan aktor negara adalah tiga hal penting yang diperlukan dalam konteks penguatan identitas nasional. Vonder Mehden (1987) mengungkapkan “*betapa bergunanya ideologi dalam memupuk persatuan dan kemantapan nyata sekali*”. Bagi Mehden, ideologi di negara berkembang menjadi suatu kekuatan persatuan dan kestabilan. Sehingga keberadaan ideologi *Juche* tidak bisa dijauhkan dari konteks nasionalisme Korea Utara yang berasal dari pemikiran Kim Il Sung.

Masalah sebenarnya terletak pada ajaran inti Marxisme itu sendiri, yang tidak menghendaki adanya konsep *nation-state* dengan perkembangan nasionalisme di Korea Utara sebagai negara ketiga. Pada prinsipnya, Marx dan Lenin menganggap bahwa paham nasionalisme adalah usaha kapitalis melakukan fragmentasi dalam upayanya memperluas pasar sebagai lahan distribusi hasil produksi para kaum borjuis untuk memperpanjang usia kapitalisme. Kapitalisme merupakan rantai terakhir dari proses perubahan masyarakat menuju komunisme yang tanpa kelas setelah melalui revolusi.

Oleh sebab di atas, peneliti ingin menekankan bahwa komunisme Korea Utara sangatlah unik dan berbeda dengan negara komunis lainnya. Kebijakan politik Kim Il Sung melahirkan ideologi *Juche* secara politik pun mendukung upaya kebangkitan nasionalisme Korea dengan berbagai penerapan kebijakannya. Dari permasalahan di atas peneliti akan memfokuskan bahasan penelitian pada penerapan ideologi *Juche* dalam kehidupan Korea Utara sebagai alat untuk

Fajar Munandar, 2017

NASIONALISME KOREA UTARA: PENERAPAN IDEOLOGI JUCHE PADA MASA PEMERINTAHAN KIM IL SUNG (1955-1994)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Il Sung. Dalam penelitian ini gaya kepemimpinan Kim Il Sung pun turut dianalisis untuk melihat bagaimana Kim Il Sung mengimplementasikan ide politiknya ini. Maka dalam skripsi ini peneliti akan memakai judul **“Nasionalisme Korea Utara: Penerapan Ideologi Juche Pada Masa Pemerintahan Kim Il Sung (1955-1994)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa pokok permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang masalah, timbul berbagai banyak pertanyaan masalah. Maka penulis merumuskan masalah utama yang akan dibahas dalam kajian penelitian, yaitu bagaimana nasionalisme Korea Utara dalam penafsiran ideologi *Juche* Kim Il Sung? Untuk lebih memfokuskan kajian, penelitian ini dibatasi dalam beberapa pertanyaan, diantaranya:

1. Apa yang melatar belakangi Kim Il Sung menciptakan ideologi *Juche*?
2. Bagaimana gagasan-gagasan pokok ideologi *Juche* dalam kaitannya dengan nasionalisme Korea Utara?
3. Bagaimana upaya implementasi ideologi *Juche* dalam kehidupan di Korea Utara 1955-1994?
4. Bagaimana dampak dari penerapan ideologi *Juche* terhadap bangsa Korea Utara tahun?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan penelitian secara umum adalah menganalisis ideologi *Juche* sebagai alat politik untuk membangkitkan semangat nasionalisme bangsa dan penerapannya di Korea Utara, sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Menganalisis latar belakang Kim Il Sung menciptakan ideologi *Juche* di Korea Utara.
2. Menganalisis mengenai pemikiran-pemikiran inti Kim Il Sung sebagai tokoh nasionalis Korea Utara dalam melahirkan ideologi *Juche*.
3. Menganalisis upaya-upaya ideologi *Juche* yang diterapkan terhadap bangsa Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Il Sung dari awal diberlakukannya pada 1955 sampai peletakan jabatannya pada tahun 1994 saat dimana Kim Il Sung meninggal.

Fajar Munandar, 2017

NASIONALISME KOREA UTARA: PENERAPAN IDEOLOGI JUCHE PADA MASA PEMERINTAHAN KIM IL SUNG (1955-1994)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4. Menganalisis dampak yang terjadi setelah menerapkan ideologi *Juche* dalam kehidupan berbangsa di Korea Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat secara umum dari penelitian adalah sebagai pengetahuan tentang salah satu dari sekian banyak bentuk nasionalisme di salah satu kawasan Asia Timur, Korea Utara, yang memiliki keunikan dibanding dengan negara di kawasan tersebut. Sedangkan manfaat khusus dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai pengaruh pemikiran Kim Il Sung dalam kebangkitan nasionalisme di Korea Utara. Hal ini tentunya menambah wawasan mengenai sejarah intelektualitas peneliti dan menunjang kompetensi peneliti sebagai seorang akademisi yang bergelut dalam bidang sejarah. Di samping itu, penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada peneliti bagaimana sebuah ideologi lahir dan berkembang di sebuah negara.
2. Bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah, khususnya yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai bahan pembelajaran yang dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai pemikiran-pemikiran di kawasan Asia Timur, khususnya pemikiran Kim Il Sung di Korea Utara. Tidak bisa dipungkiri bahwa kajian mengenai Korea Utara oleh para mahasiswa Pendidikan Sejarah masih sangat minim, apalagi terhadap pemikiran-pemikirannya. Padahal sebuah hal yang menarik ketika sebuah negara yang dipandang aneh, nyentrik bahkan terkesan menutup diri mampu menjadikan masyarakatnya begitu teratur dan tertib, itu terjadi di Korea Utara. Hal ini terjadi akibat kurangnya daya tarik mahasiswa karena stigma negatif yang telah diberikan kepada Korea Utara dan sulitnya sumber ilmiah dalam negeri yang membahas Korea Utara. Selama ini nilai-nilai nasionalisme di kawasan Asia Timur lebih banyak membahas tentang Tiongkok dan Jepang. Padahal Korea pun

mengalami fase perkembangan pembentukan nasionalisme, meski akhirnya harus terpecah menjadi dua negara.

3. Bagi masyarakat yang peduli akan sejarah pada umumnya dan masyarakat sekitar yang peduli akan pendidikan khususnya, peneliti berharap skripsi ini bisa menjadi salah satu sumber informasi yang bermanfaat terlebih mengenai sejarah intelektual khususnya mengenai pengaruh pemikiran seorang tokoh besar bagi bangsa dan negaranya. Dengan kata lain, kita bisa mengambil atau mencontoh hal-hal baik dari sesuatu yang selama ini kita anggap berbeda dari umum dan dinilai buruk, seperti Kim Il Sung dan Korea Utara.
4. Manfaat nyata dari penelitian skripsi ini diharapkan bisa menjadi bacaan masyarakat umum dengan harapan agar bisa memberikan nilai-nilai pengajaran betapa pentingnya menjaga semangat nasionalisme dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peneliti berharap bahwa masyarakat Indonesia bisa belajar dari bangsa Korea yang begitu susah payah mempertahankan wilayah kesatuannya hingga harus terpecah menjadi dua. Khusus dalam penelitian ini, peneliti berharap terlepas dari perbedaan ideologi yang berbeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa Korea Utara, masyarakat Indonesia bisa menyerap semangat-semangat yang terus bergelora dalam benak bangsa Korea dalam upaya-upaya yang menunjukkan eksistensi sebuah negara-bangsa.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan merupakan sebuah gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian yang dilakukan dari tahap awal sampai pada proses penulisannya. Data atau hasil yang didapatkan melalui proses observasi, telaah pustaka, studi dokumentasi, dan wawancara selanjutnya dikumpulkan kemudian diolah menjadi sebuah laporan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian awal penulisan, didalamnya diuraikan latar belakang masalah penelitian yang diangkat oleh peneliti dilihat dari kesenjangan yang

Fajar Munandar, 2017

NASIONALISME KOREA UTARA: PENERAPAN IDEOLOGI JUCHE PADA MASA PEMERINTAHAN KIM IL SUNG (1955-1994)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

nampak dari sebuah realita yang ada dengan kondisi yang ideal dari masalah tersebut sehingga dengan begitu terlihat alasan mengapa persoalan penting untuk diangkat. Selain dari latar belakang masalah penelitian, pada bagian ini juga terdapat rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti, manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti dengan dilakukannya penelitian ini, metode penelitian dan teknik pengumpulan data serta sistematika dari penulisan juga dimuat pada bab pendahuluan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka berisi mengenai penggunaan konsep atau teori serta referensi yang digunakan peneliti untuk menjelaskan berbagai permasalahan yang diangkat. Dalam bab ini peneliti menggunakan kajian buku-buku yang relevan dengan pembahasan penelitian skripsi peneliti dan penggunaan teori yang mendukung. Kajian-kajian buku tersebut berkaitan dengan konsep nasionalisme, ideologi *Juche*, dan keadaan Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Il Sung. Dalam penggunaan teori, peneliti memakai teori tipe-tipe dan gaya kepemimpinan untuk menjadi pisau analisis mengenai gaya kepemimpinan Kim Il Sung di Korea Utara. Hal ini untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai sistem pemerintahan Kim Il Sung di Korea Utara.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menelusuri berbagai data, mengumpulkan data atau heuristik yang kemudian verifikasi dimana dilakukan sebuah kritik baik kritik internal maupun kritik eksternal sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan berbagai pertimbangan. Selanjutnya dilakukan sebuah analisis kritik atau diinterpretasikan yang kemudian diolah menjadi sebuah laporan penelitian atau penulisan sejarah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku.

BAB IV KEBANGKITAN NASIONALISME KOREA UTARA MELALUI PENERAPAN IDEOLOGI *JUCHE* PADA MASA PEMERINTAHAN KIM IL SUNG (1955-1994)

Pada bab ini peneliti akan menguraikan pembahasan mengenai proses terbentuknya ideologi *Juche* di Korea Utara. Proses ini sangat berkaitan dengan

sejarah dan kedudukan Kim Il Sung sebagai tokoh revolusioner dan nasionalis Korea. Meski dalam latar belakang telah disinggung mengenai peranan Kim Il Sung dalam pembebasan Korea, akan tetapi dalam bab ini peneliti akan mengkhususkan pada latar belakang dilahirkannya ideologi *Juche*. Selanjutnya penelitian juga menganalisis gagasan-gagasan utama ideologi *Juche* sebagai alat membangkitkan nasionalisme bangsa Korea Utara oleh Kim Il Sung. Pembahasan ini pula akan masuk dalam konteks penerapan dan dampak yang ditimbulkan dengan dijadikannya ideologi *Juche* sebagai ideologi tunggal dan dasar pembangunan Korea Utara.

BAB V KESIMPULAN

Bab terakhir merupakan jawaban atas hasil permasalahan sesuai dengan interpretasi penulis. Dalam kesimpulannya, peneliti berusaha untuk memberikan pandangan peneliti terhadap kedudukan ideologi *Juche* sebagai suatu alat untuk menghimpun dan membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Korea Utara. Bab ini juga memuat saran dan rekomendasi dari peneliti kepada berbagai pihak yang terkait dan memiliki kepentingan terhadap hasil penelitian ini.